

PERLUAS LAYANAN MASYARAKAT DISPUSIP

Buka Pojok Baca Digital

WONOSARI (KR) - Setelah meraih minat baca tertinggi kedua Nasional, Dinas Perpustakaan Gunungkidul terus melakukan inovasi dan peluasan pelayanan sarana baca di masyarakat. Jika sebelum sasaran perluasan ke sekolah-sekolah dan kalurahan, kali ini berkerja sama dengan Polres Gunungkidul. Paket hibah ini di tempat di Polres karena sebagai lokasi strategis dan lokasi pelayanan publik yang banyak di datangi masyarakat.

"Sehingga sembari menunggu proses pelayanan, warga dapat memanfaatkan pojok baca digital (Pocadi) yang ditempatkan pada gedung terpadu Parama Satwika Polres Gunungkidul," kata Kepala Dinas Perpustakaan



KR-Endar Widodo

Kisworo MPd tinjau Pojok Baca Digital di Polres Gunungkidul

dan Kearsipan (Dispusip) Gunungkidul Kirworo SPd MPd disela-sela peninjauan Pocadi, Selasa (4/4). Pocadi yang merupakan hibah dari Peputrakaan Nasional Republik Indonesia ini , lanjut Kisworo MPd, dilengkapi dengan koleksi tercetak, koleksi digital, rak buku, meja, kursi, karpet, server ko-

leksi digital, computer, tablet, televisi serta akses internet. Perpustakaan digital ini merupakan perpustakaan mini yang lengkap, modern yang membuat para pengunjung nyaman dan mendapatkan banyak tambahan pengetahuan dengan fasilitas teknologi digital.

(Ewi)

Pemkab Ajukan Tambahan Kuota Gas Elpiji

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul mengajukan tambahan kuota gas elpiji 3 kilogram untuk menghadapi perayaan Idul Fitri tahun ini. Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Gunungkidul Kelik Yuni-antoro menyatakan tambahan kuota ini dilakukan agar kebutuhan gas elpiji bagi masyarakat dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun ini tercukupi. Dari usulan kenaikan kuota mencapai sekitar 5 persen dari total kuota yang ada. "Kami sudah mengajukan tambahan kuota sebesar lima persen dari kuota biasa dari kuota biasanya," katanya, Senin (4/4).

Berdasarkan data lapangan untuk kuota yang dimiliki saat ini masih mencukupi dan distribusi ke masyarakat juga berjalan dengan lancar. Meskipun demikian, pihaknya tetap bakal meminta tambahan pasokan untuk persiapan perayaan Hari Raya Idulfitri. Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, jelang Hari Raya Idul Fitri kebutuhan gas di masyarakat meningkat baik subsidi maupun non subsidi.sehingga perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kelangkaan di masyarakat.

kat. "Kami minta tambahan 5 persen dari kuota biasanya," katanya.

Ditambahkan Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan Gunungkidul, Asih Wulandari pihaknya komitmen untuk memastikan kebutuhan pokok akan gas elpiji di masyarakat pada saat Hari Raya Idul fitri mencukupi dan tidak terjadi kelangkaan. Salah satunya memastikan ketersediaan gas untuk rumah tangga tetap tersedia.Saat ini di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 16.141 metrik ton dan didistribusikan setiap bulan ke berbagai penyalur resmi.

Adapun harga jual masih sesuai dengan ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.500 per tabung.Selain upaya penambahan stok, juga akan melakukan pengawasan di lapangan guna memastikan penyaluran dapat tepat sasaran. Sesuai dengan peruntukan gas bersubsidi ini hanya diperuntukan bagi keluarga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil. Adapun masyarakat mampu serta pengusaha rumah makan berskala besar diwajibkan memakai gas non subsidi.

(Bmp)

PCNU GUNUNGKIDUL SAFARI RAMADAN
Bagikan Mushaf Alquran, Terjukkan 100 Dai

WONOSARI (KR) - Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) bersama Pengurus Cabang NU (PCNU) Gunungkidul mengadakan Safari Ramadan di 18 Majelis Wakil Cabang (MWC) NU. Dalam safari ini menyasar sebanyak 161 lokasi yang dilaksanakan mulai Jumat (31/3) hingga Senin (3/4). "Sebanyak 100 dai diterjunkan dalam pelaksanaan Safari Ramadan. Dai diterjunkan di masing-masing MWCNU dan melaksanakan kegiatan Safari Tarawih di masjid. Totalnya menyasar sebanyak 161 lokasi di Gunungkidul,i kata Ketua LDNU Gunungkidul Ahmad Munir SHI, Selasa (4/4).

Pada pelaksanaan Safari Ramadan, juga didistribusikan Mushaf Alquran, menyerahkan bantuan kepada MWCNU dan pentasaruhan zakat. Selain itu juga dibagikan buku khutbah



KR-Dedy EW

KH Tsamin Fauzi serahkan Mushaf Al Quran.

Jumat Ulama NU Kabupaten Gunungkidul. Dalam Safari Ramadan di MWCNU Karangmojo, Senin (3/4), rombongan dai dan PCNU diterima langsung Ketua MWCNU Karangmojo Sugiyo MPd bersama Kapolsek Karangmojo beserta takmir masjid di Kantor MWCNU Karangmojo. Dalam kesempatan tersebut pimpinan rombongan PCNU KH Tsamin

Fauzi juga simbolis menyerahkan Mushaf Al Quran dan diterima Rois Syuriah MWCNU Karangmojo KH Syaiful MPd. Ketua MWCNU Karangmojo Sugiyo menambahkan, selanjutnya untuk dai diterjunkan di masjid yang sudah dijadwalkan. Untuk melaksanakan Safari Tarawih di Bulan Ramadan ini.

(Ded)

BELUM MENJANGKAU SELURUH SEKOLAH
Tahun Ini Direhab, 7 Gedung SD Rusak Parah

WONOSARI (KR) - Tujuh Gedung SD di Kabupaten Gunungkidul dipastikan tahun ini akan dilakukan perbaikan fasilitas gedung yang rusak.Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tahun ini menyiapkan anggaran sekitar Rp 3,9 miliar dengan prioritas terhadap gedung sekolah yang direhab terutama sekolah yang dinilai mengalami kerusakan cukup parah. Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana, Bidang SD, Dinas Pendidikan Gunungkidul, Suheru terus berupaya agar perbaikan SD yang mengalami kerusakan dapat diakomodir setiap tahun. "Namun karena terbatasnya anggaran belum bisa menjangkau semua SD yang mengalami kerusakan," katanya Selasa (4/4).

Untuk ahun ini pihaknya hanya melakukan perbaikan di tujuh SD yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).Adapun perbaikan SD yang bersumber dari DAK menyasar lima SD di antaranya SDN Kenteng 2, SDN Wota Wati, SD Muhammadiyah Kuwon, SDN Klayar,

dan SDN Sambeng dengan total anggaran sekitar Rp. 3,9 miliar. Kelima SD tersebut juga bakal menerima bantuan TIK senilai Rp. 125 juta per sekolahnya. Sedangkan perbaikan dua SD lainnya yang bersumber dari DAU ialah SD Muhammadiyah Jarah dan SDN Beji senilai Rp. 185 juta per sekolahnya.

"Perbaikan Gedung SD yang mengalami kerusakan terus dilakukan setiap tahunnya sebagai upaya mencapai standar pelayanan minimal juga memberikan rasa aman warga sekolah," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati MM, menambah jika pada tahun ini pihaknya terimbas adanya refokusing anggaran sehingga penurunan anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan Gunungkidul turun cukup signifikan. Namun demikian upaya perbaikan sekolah tetap diusahakan agar para siswa dapat merasa aman dan nyaman saat belajar.

"Penurunan anggaran memang banyak pada tahun ini karena ada refokusing anggaran terdampak Covid-19," pungkasnya.

(Bmp)

DPKUKMTK LAKUKAN MONITORING

Tidak Terima THR, Buruh Bisa Mengadu

WONOSARI (KR) - Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Gunungkidul melakukan memonitor terhadap sejumlah perusahaan terkait dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan maupun perusahaan.

Kepala Seksi Hubungan Industrial, Bidang Tenaga Kerja, DPKUKMTK Gunungkidul, Mariana Anihastuti mengatakan sosialisasi tentang ketentuan wajib pemberian THR sudah dilakukan dan pihaknya berharap tidak satupun perusahaan tidak melakukan ketentuan wajib pemberian THR. "Sesuai ketentuan, seluruh perusahaan wajib memberikan THR paling lambat H-7 Lebaran,"

katanya Selasa (4/4).

Berdasarkan pendataan hasil monitoring di Kabupaten Gunungkidul saat ini sudah ada 47 perusahaan yang menyatakan kesiapannya untuk membayarkan THR kepada para karyawan maupun pekerjanya. Sesuai dari keterangan masing-masing perusahaan pembayaran akan direalisasikan mulai pekan depan. Karena itu pihaknya tetap akan melakukan

antisipasi, jangan sampai terjadi ada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam pemberian THR. Kepada para pekerja perusahaan pihaknya mengimbau jika sampai tidak menerima THR maka para buruh bisa mengajukan masalah tersebut ke posko Kantor DPKUKMTK Gunungkidul. "Pengaduan tentu akan diproses dan diteruskan sampai propinsi DIY," ujarnya.

Adapun besaran THR yang wajib diberikan sebesar 1 kali gaji sebulan bagi pegawai yang masa kerjanya di atas setahun. Sedangkan bagi pekerja kurang dari setahun, THR diberikan secara proporsional.

Pemberian THR juga tidak boleh dicitil, harus dan harus dilakukan secara penuh. "Pemberian THR harus dilakukan secara penuh dan tidak boleh dicitil," katanya.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Gunungkidul, Budiya juga mengharapkan agar seluruh perusahaan menunaikan kewajibannya tersebut. Pihaknya juga berharap agar THR bisa diberikan sebelum tanggal 19 April 2023 atau mendekati masa cuti bersama. Tujuannya agar THR tersebut bisa segera dimanfaatkan pekerja.

(Bmp)

JELANG MUSIM MUDIK LEBARAN 2023

Petugas Gabungan Cek Armada Bus



KR-Asrul Sani

Petugas gabungan memeriksa armada bus di Terminal Wates.

persyaratan. Masa berlaku uji KIR juga masih aman. Rata-rata hingga September 2023 bahkan Februari 2024.

Kendati demikian, petugas menemukan adanya penyimpangan trayek.

"Petugas kami menemukan ada dua armada bus yang trayeknya agak menyimpang. Jadi titik hentinya bukan di Terminal Wates. Di sini mungkin istirahat atau pembersihan kendaraan. Tadi sudah kita lakukan pembinaan," tegasnya.

Usai melakukan pemeriksaan, petugas memasang stiker di tiap bus sebagai penanda armada itu layak melayani angkutan lebaran maupun perjalanan seperti biasanya.

Sementara itu sopir bus Murni Jaya, Sigit Kamal membenarkan petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan dan dokumen. Armada yang disopirinya dinyakan lolos.

kan pembinaan," tegasnya.

Usai melakukan pemeriksaan, petugas memasang stiker di tiap bus sebagai penanda armada itu layak melayani angkutan lebaran maupun perjalanan seperti biasanya.

Sementara itu sopir bus Murni Jaya, Sigit Kamal membenarkan petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelaikan kendaraan dan dokumen. Armada yang disopirinya dinyakan lolos.

(Rul)

RKPD KULONPROGO 2024 MEMUAT 6 PROGRAM UNGGULAN

PR Wujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

WATES (KR) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono SIP menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (pemkab) setempat memprioritaskan enam program unggulan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Enam prioritas pembangunan dimaksud penanggulangan kemiskinan ekstrem, perwujudan kawasan Aerotropolis sekitar Yogyakarta Internasional Aiport, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan tata

kelola pelayanan publik.

"Penyusunan RKPD 2024 sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, bagian tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah," jelas Sekda Triyono, Senin (3/4).

Pemkab ungkapnyapunya PR mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Lantaran indeks gini rasio Kulonprogo cukup tinggi, yakni 0,380 dan tingkat kemiskinan per 2022 sebesar 16,39 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2022, 6,57 persen.

"Kinerja 2022 tidak men-



KR-Asrul Sani

Sekda Triyono MSI.

capai target yakni gini rasio dan indeks pembangunan berkelanjutan. Pada 2024, pembangunan Kulonprogo mengusung isu strategis pemerataan ekonomi yang belum optimal dan penanganan kemiskinan ekstrem," kata Triyono.

Sedangkan Pj Bupati setempat Drs Tri Saktiyana

menegaskan program perwujudan kawasan Aerotropolis sekitar YIA untuk mengatasi persoalan investasi dan lainnya.

"Perwujudan kawasan aerotropolis untuk mengatasi masalah sekaligus mewujudkan mimpi," tuturnya.

Diungkapkan, untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut dai prediksi pendapatan daerah sekitar Rp 1,371 triliun belum termasuk dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan khusus (BKK) reguler DIY, direncanakan untuk belanja program kegiatan sekitar Rp 1,386 triliun dan penyertaan modal BUMD Rp 24,2 m.

(Rul)

Pemkab Sampaikan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi

PENGASIH (KR) - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan Pj Bupati dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kulonprogo H Ponimin Budi Hartono SE MM, Selasa siang (4/4), di Ruang Kresna Gedung DPRD setempat.

Disampaikan Pj Bupati Kulonprogo Drs Tri Saktiyana MSI, dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang saat ini menjadi dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilakukan restrukturisasi dan rasionalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan dengan integrasi dan reklasifikasi 5 jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu.

"Dengan demikian jumlah Pajak Daerah yang dipungut Daerah berjumlah 9. Jumlah pajak tersebut mencakup kewenangan baru bagi Daerah dalam skema pemungutan Opsen

Pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan adanya mekanisme Opsen Pajak diharapkan dapat meningkatkan kemandirian Daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak," urainya.

Dikatakan, rasionalisasi juga dilakukan terhadap Retribusi Daerah dengan menyederhanakan jumlah objek Retribusi dari sebelumnya 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan. Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan retribusi serta meminimalisasi biaya pemungutan dan biaya kepatuhan.

"Selain itu, penyederhanaan juga dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan pelayanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah," ucap Pj Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meny-

takan seluruh Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah masih tetap berlaku paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan. "Sehingga Pemerintah Daerah perlu segera melakukan integrasi, harmonisasi, penataan kembali, dan penyesuaian dengan kondisi saat ini terhadap berbagai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah," ujar Tri Saktiyana.

Dikatakan, Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan penerimaan Daerah, serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(Wid)